

Pejabat Bingung Buat Laporan

SDM Keuangan Belum Merata

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengakui banyak keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Bahkan setingkat pejabat eselon dua ada yang kebingung dalam pelaporan keuangan. Tak jarang akibat keterbatasan tersebut berbuah laporan temuan-temuan yang mencurigakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya saat menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara yang digelar Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, Rabu (5/10) di Hotel Aston, Jl Gajahmada.



TRIBUN/DOK

” Kadang pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota bingung seperti apa laporan untuk BPK dan Kementerian Dalam Negeri, terutama masalah aset. ”

CHRISTIANDY SANJAYA

Wagub Kalbar

Wagub mengungkapkan keterbatasan tersebut berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur di daerah. Baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota sama-sama menghadapi permasalahan itu.

Laporan keuangan setiap Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa BPK banyak menemukan temuan yang mencurigakan. Akibatnya muncul ketakutan-ketaku-

kan kepala dinas dan berujung terganggunya kinerja dalam melayani masyarakat.

Wagub menegaskan temuan tersebut bukan berarti ada penyelewengan atau kerugian negara yang ditimbulkan. Bisa jadi karena ada salah pe-

■ Bersambung ke Hal 15

Evaluasi BPK di Kalbar

- Tahun 2010 terdapat 63 laporan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 590 yang diperiksa BPK
- Pemeriksaan yang dilakukan BPK Kalbar dari 15 laporan keuangan Pemda belum satupun yang memperoleh predikat WTP

Saran

- Kepala daerah dan jajaran perlu melakukan rencana aksi secara optimal
- Peran Inspektorat Perlu Ditingkatkan
- DPRD perlu mengawasi *action plan*
- Mengatasi masalah SDM

SUMBER: ABDUL LATIEF (AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI BPK), DATA: RZK

Pejabat Bingung Buat Laporan

Sambungan Hal. 9

nafsiran antara SKPD dengan BPK. Salah tafsir tersebut satu di antaranya akibat minimnya SDM yang dimiliki daerah, terutama Kalbar.

”Kadang pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota bingung seperti apa laporan untuk BPK dan Kementerian Dalam Negeri, terutama masalah aset,” ungkapnya saat memberikan sambutan di *Focus Group Discussion* Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD-RI, Rabu (5/10) siang di Hotel Aston Pontianak.

Keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah yang paham dalam penyajian laporan keuangan daerah merata di semua lini, termasuk para pejabat eselon II. Bahkan di antara pejabat tersebut ada yang bingung dalam pelaporan keuangan. Akibatnya waktu penyusunan pun sering kali memakan waktu lama dan harus dilakukan perbaikan berulang-ulang.

Wagub juga menyangkan saat ini tidak ada *link and mach*

audity dalam sistem pelaporan keuangan daerah. Sehingga, antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot sering terjadi kesalahpahaman, begitupun hubungan dengan pemerintah pusat yang tidak terkoneksi dengan baik.

Link and mach audity menurutnya bisa menghindari miskomunikasi dan kesimpangsiuran antartingkat dalam pemerintahan yang kerap terjadi. Selain itu juga mencegah kerugian negara yang ditimbulkan akibat ketidakserasian tersebut. ”Saya ibaratkan *link and mach audity* ini sebagai akuarium yang terang benderang, semua orang bisa lihat dari sisi mana saja,” lanjutnya.

Meski demikian Wagub mengapresiasi pemerintah pusat yang mengucurkan dana dekonsentrasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi daerah setiap kali membuat laporan keuangan. Kalbar menerima kucuran dana tersebut sebesar Rp 5,36 tahun 2011.

Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD-RI, Farouk

Muhmammad, mengatakan banyak temuan dari BPK hampir merata di semua daerah. Temuan tersebut baik menyangkut pengendalian internal keuangan daerah dan kepatuhan terhadap hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara.

Ditegaskan Farouk temuan BPK tidak semua kerugian negara akibat tindak korupsi, tetapi lebih kesalahan-kesalahan dalam proses administrasi. Satu di antara penyebab utamanya adalah salah tafsir antara aparatur daerah yang menjalankan pemerintahan dan auditor, termasuk besaran angka kerugian dan ketidakjelasan standar pemeriksaan.

”Harus punya aturan yang pasti, peraturan standar untuk pengelolaan keuangan daerah harus ada. Ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian negara agar tidak terperosok lebih jauh kepada ketidakpastian,” ungkapnya kepada *Tribun*.

Diakuinya sistem otonomi saat ini belum bisa berjalan

dengan baik karena SDM yang dimiliki daerah belum siap. Sebagai dampaknya sangat berpengaruh kepada keuangan daerah yang banyak terbuang percuma dan akhirnya menjadi temuan oleh BPK.

”Kita sudah datang 6-7 provinsi dan semua permasalahannya sama, yaitu SDM yang kurang. Termasuk kesulitan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki,” lanjutnya.

Focus Group Discussion yang dihadiri perwakilan kabupaten/kota se-Kalbar. Di antara Bupati Sanggau Setiman A Sudin, Sekda Landak Ludis, dan Sekda Kota Pontianak M Akip. Hadir pula anggota DPD-RI asal Kalbar Erma S Ranik. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan kepada DPD-RI terkait masalah laporan keuangan daerah. Masukan dari daerah setidaknya menjadi gambaran kepada lembaga senator untuk mengawal pembuatan undang-undang keuangan daerah. (rzk)